



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2022**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LKj BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, Februari 2023



**INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI**

**H. KAMILAN, SH, MM, CGCAE**

**PEMBAINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19650603 198602 1 004**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

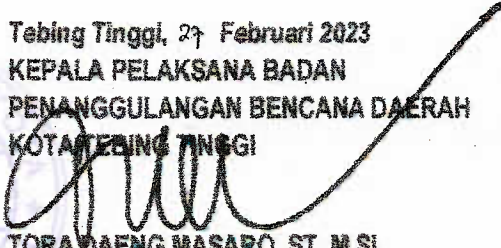
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah tahun 2022 ini adalah sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*Government by Result Oriented*). Kami berharap Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, 27 Februari 2023  
KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI

  
TORA DAENG MASARO, ST, M.SI  
PEMBINA  
NIP. 19731101 200502 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama.....	9
1.4. Landasan Hukum.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Rencana Strategis.....	12
2.1.1. Visi Kepala Daerah.....	12
2.1.2. Misi Kepala Daerah.....	12
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	12
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	13
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
3.2. Realisasi Anggaran .....	47
BAB IV PENUTUP.....	55
Lampiran.....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia sekarang ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja perangkat daerah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi, berlokasi di Jl. Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya organisasi, mulai dari SDM,

sarana dan prasarana dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kota Tebing Tinggi. Laporan kinerja BPBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 disusun berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022.

## **1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
- b. cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala;
  - Kepala Badan secara jabatan (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
  - Kepala Badan membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

b. Unsur Pengarah;

- Unsur Pengarah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah terdiri dari ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota terdiri atas:

- a. pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah sebanyak 5 (lima) orang; dan
- b. masyarakat profesional di daerah sebanyak 4 (empat) orang.

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Unsur Pelaksana.

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

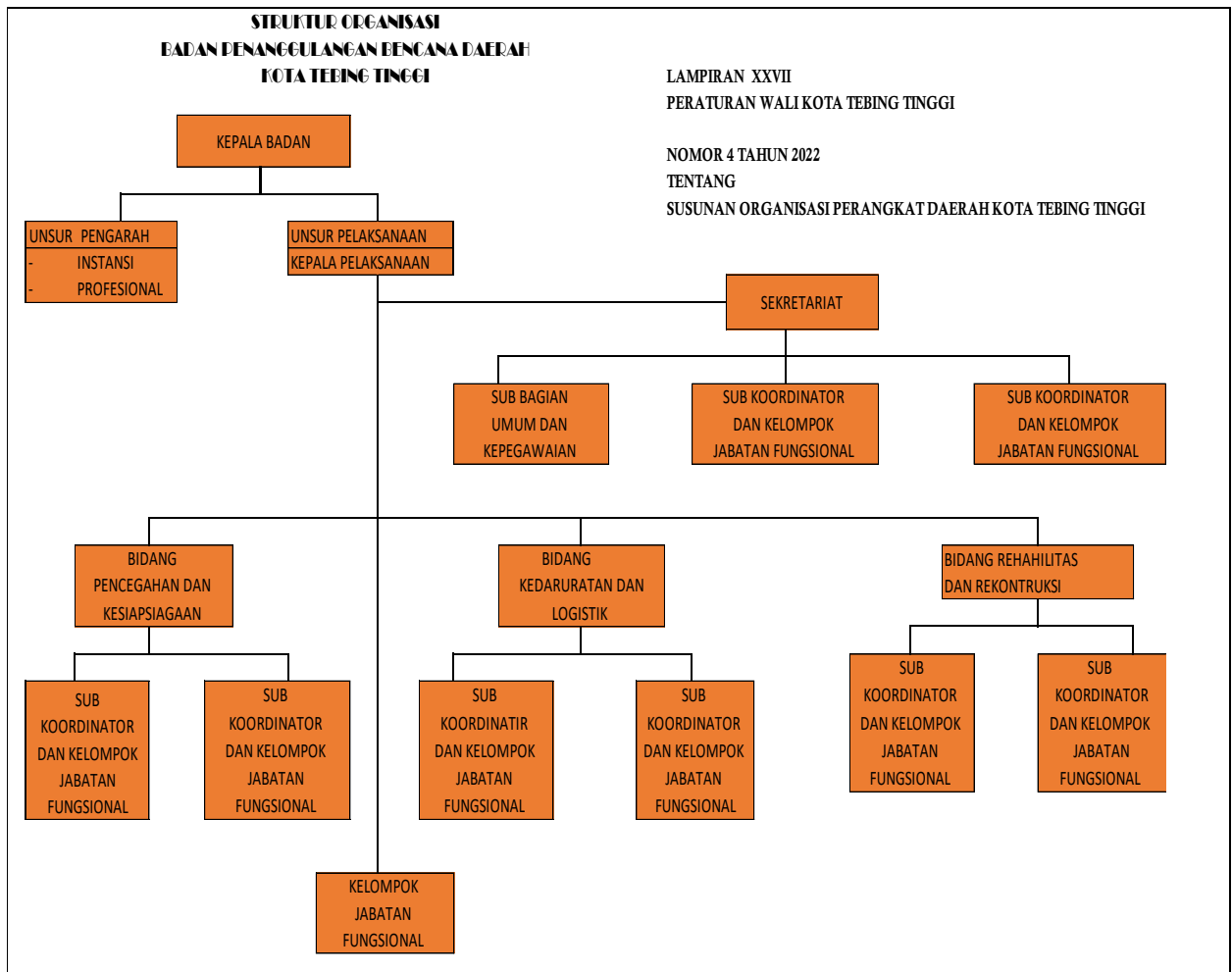
- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- pengkomandoan merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- pelaksana merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2 (dua) Sub Koordinator;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
  - 2 (dua) Sub Koordinator;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
  - 2 (dua) Sub Koordinator;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
  - 2 (dua) Sub Koordinator;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.





## Keadaan Pegawai

Pegawai adalah orang-orang yang dipekerjakan dalam suatu badan tertentu, baik itu pemerintahan maupun badan usaha lainnya. Pegawai Negeri Sipil yang saat ini disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah., yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai merupakan modal pokok berjalannya suatu instansi. Keberhasilan tujuan yang ingin dicapai suatu instansi tergantung pada pegawai yang memimpin dan melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam suatu instansi. Selain kuantitas, kualitas dan kompetensi pegawai juga sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam suatu instansi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sejumlah pegawai yang mengemban tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditinjau dari sisi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 adalah 19 orang ASN dan 30 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Data pegawai/staf yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi saat ini adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI- LAKI	15 orang
2	PEREMPUAN	4 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>19 orang</b>

Klasifikasi Pendidikan Formal ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	6 orang
2	S1	8 orang
3	D3	2 orang

4	SLTA	3 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>19 orang</b>

Susunan Golongan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi :

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	2 orang
2.	Golongan III	14 orang
3.	Golongan II	3 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>19 orang</b>

Klasifikasi Pegawai Non ASN / THL Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI- LAKI	19 orang
2	PEREMPUAN	11 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>30 orang</b>

Klasifikasi Pendidikan Formal THL Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	S1	12 orang
2	D3	2 orang
3	SLTA	15 orang
4	SLTP	1 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>30 orang</b>

### Sarana dan Prasarana

Saat ini, BPBD Kota Tebing Tinggi terletak di Jl. Gunung Leuser Tebing Tinggi memiliki Gedung Kantor dan Gudang bertingkat dengan luas bangunan 425,520 M<sup>2</sup>, secara rinci Kantor BPBD Kota Tebing Tinggi terdiri dari:

1. Gedung Kantor Utama

Terdiri dari :

- a. Ruang Kepala Pelaksana
- b. Ruang Sekretaris
- c. Ruang Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Ruang Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Subbag Perencanaan
- e. Ruang Staf
- f. Ruang Subbag Keuangan dan Bendahara
- g. Ruang main anak/ Busui
- h. Kamar mandi

2. Gedung Gudang

Terdiri dari:

1. Gudang Peralatan dan Logistik
2. Ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Ruang Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Ruang Aula Rapat
5. Kamar Mandi

<b>No.</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Unit</b>
1	Water Treatment (Mesin Proses)	1
2	Portable Generating Set	6
3	Pompa Air	6
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2
5	Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1
6	Sepeda Motor	9
7	Mobil Pemadam Kebakaran	1
8	Gerobak Dorong	2
9	Kendaraan tak bermotor penumpang lainnya (dst)	2
10	Out Boat Motor	5
11	Perahu Penumpang	9
12	Gergaji Chain Saw	1
13	Air Blower	2
14	Bak Air	1
15	Gergaji	1
16	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2
17	Lemari Kayu	9
18	Rak Besi	5
19	Rak kayu	2
20	Filling Cabinet Besi	9
21	Brandkas	1
22	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	7
23	CCTV – Camera Control Television System	1

No.	Nama Aset	Unit
24	White Board	1
25	Alat Penghancur Kertas	1
26	Mesin Absensi	1
27	Display	1
28	LCD Projector/Infocus	1
29	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
30	Papan Nama Instansi	1
31	Meja Kerja Kayu	5
32	Kursi Besi/Metal	43
33	Meja Rapat	42
34	Meja Resepsionis	1
35	Meja Bundar	1
36	Meja ½ Biro	9
37	Kursi Tamu	4
38	Kursi Putar	13
39	Sofa	3
40	A.C. Split	11
41	Treng Air/Tandon Air	2
42	Televisi	2
43	Camera film	1
44	Dispenser	4
45	Handy Cam	1
46	Gordyin/Kray	28
47	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1
48	Alat Pemadam/Portable	1
49	Hidran kebakaran	1
50	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10
52	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2
53	Camera Electronic	1
54	Alat Studio Video Lainnya	1
55	Handy Talky (HT)	6
56	Facsimile	1
57	Unit Tranceiver Ssb Portable	1
58	Wireless Amplifier	1
59	Tabung O2	4
60	Compressor	1
61	Compressor Unit	1
62	Alat Demonstrasi Pernapasan	3
63	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lain	6
64	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	16
65	Helm Dalmas	4
66	P.C Unit	3
67	Lap Top	16
68	Note Book	4
69	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
70	Monitor	1
71	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15

No.	Nama Aset	Unit
72	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
73	Baju Anti Panas	4
74	Sepatu Boot	4
75	Tenda	25
76	Rambu-rambu Larangan	10
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1
3	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	1
4	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	2
5	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen	1
6	Taman Semi Permanen	1
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3

## Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah ketersediaan sumber daya keuangan yang dimiliki. Untuk tahun 2022, jumlah anggarannya adalah Rp.22.088.351.248,00 (Dua puluh dua milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri dari :

- Belanja Langsung = Rp. 1.234.574.637,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)
- Belanja Tak Langsung = Rp. 20.853.776.611,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah)

### 1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Isu – isu strategis bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dikarenakan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) masih dalam proses penyelesaian, dan pusdalops penanggulangan bencana.
- b. Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana dikarenakan belum adanya dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB).
- c. Rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana.

- d. Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Belum optimalnya pembentukan kelurahan tangguh bencana.
- f. Kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana.
- g. Kurangnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana.
- h. Rusaknya Tanggul/Turap dan Pintu Klep Sungai Padang diakibatkan air yang datang cukup deras sehingga menyeret tanggul/turap yang ada.
- i. Terjadinya abrasi dan erosi di sisi Sungai Padang disebabkan sedimentasi yang cukup banyak di sungai padang sehingga terjadi pendangkalan sungai. Akibatnya air yang datang cukup kencang membuat erosi atau abrasi di sekitar antaran sungai khususnya di daerah Kel. Pabatu dan Kel.Lubuk baru.

#### **1.4. Landasan Hukum**

Dasar Hukum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Permenpan RB no 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- e. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi.

#### **1.5. Sistematika**

Adapun sistematika penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Rencana Strategis
  - 2.1.1. Visi Kepala Daerah
  - 2.1.2. Misi Kepala Daerah
  - 2.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

## **BAB IV PENUTUP**

### **Lampiran**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Mengacu kepada rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 – 2022 berikut penjabaran tujuan, sasaran, strategi, indikator dan target untuk Tahun 2022 dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi.

##### **2.1.1. Visi Kepala Daerah**

Visi Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang tertuang dalam RPJMD Periode 2017 s.d 2022 adalah “***Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Yang Cerdas, Layak, Mandiri Dan Sejahtera Dengan Sumber Daya Manusia Yang Beriman Dan Berkualitas***”.

##### **2.1.2. Misi Kepala Daerah**

Misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang tertuang dalam suplemen RPJMD Periode 2017 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi Yang Baik,
- Mewujudkan Tebing Tinggi Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Dan Perdagangan
- Mewujudkan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa
- Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perkotaan

##### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan Visi “Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Yang Cerdas, Layak, Mandiri Dan Sejahtera Dengan Sumber Daya Manusia Yang Beriman Dan Berkualitas”, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan tujuan yaitu : “Terwujudnya Kualitas Penanggulangan Bencana” dimana sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana



b. Meningkatnya responsibilitas penanganan tanggap darurat

c. Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana

Dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota pada bulan Mei 2022 sehingga untuk program kegiatan dan sub kegiatan masih melanjutkan program yang telah ditetapkan tahun 2022. Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi dapat dijabarkan pada berikut:

**Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Terwujudnya kualitas penanggulangan bencana	1	Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah masyarakat terampil dalam penanggulangan bencana	200 orang	270 orang	270 orang	270 orang	270 orang
		2	Meningkatnya Responsibilitas penanganan tanggap darurat	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap (Response Time)	70 %	75 %	80 %	85 %	85 %
		3	Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca bencana	70 %	75 %	80 %	85 %	85 %

## 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Untuk melaksanakan sasaran pertama *Meningkatnya Kesadaran Kesiapan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana*, yaitu dengan **Strategi** terwujudnya masyarakat yang siap menghadapi dampak bencana.

Untuk melaksanakan sasaran kedua *Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Tanggap Darurat*, ditetapkan **Strategi** yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana dan meningkatnya penanganan penanggulangan bencana

Untuk melaksanakan sasaran ketiga *Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Pasca Bencana*, ditetapkan **Strategi** yaitu pulihnya kondisi masyarakat yang terdampak bencana dan meningkatnya infrastruktur pasca bencana

Rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 merupakan penjabaran dari renstra, untuk mencapai tujuan dan sasaran pada renstra tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi telah menyusun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi melaksanakan tiga (3) sasaran untuk tahun 2022 yaitu:

1. Meningkatnya Kesadaran, Kesiapan Dan Kemampuan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana, yang mendukung sasaran ini adalah program penanggulangan bencana daerah dan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Tanggap Darurat, yang mendukung sasaran ini adalah program penanggulangan bencana daerah.
3. Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana, yang mendukung sasaran ini adalah program penanggulangan bencana daerah.

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya kualitas penanggulangan bencana	1	Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah masyarakat terampil dalam penanggulangan bencana	270 Orang
		2	Meningkatnya Responsibilitas penanganan tanggap darurat	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap (Response Time)	85 %
		3	Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca bencana	85 %

Dan untuk melaksanakan sasaran strategis diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi telah menyusun program dan kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.3 Sasaran dan Program**

SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN	
1.	Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1	Program Penanggulangan Bencana	1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				3	Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
				4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2.	Meningkatnya Resposibilitas Penanganan Tanggap Darurat	1	Program Penanggulangan Bencana	1	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
				2	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
3.	Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	1	Program Penanggulangan Bencana	1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada tabel dibawah perjanjian kinerja untuk tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kesadaran, Kesiapan	Jumlah masyarakat terampil	Orang	270 orang

	Dan Kemampuan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	dalam penanggulangan bencana		
2	Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Tanggap Darurat	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap (response time)	Persen	85 %
3	Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca bencana	Persen	85 %

Berdasarkan program dan kegiatan pada tabel dibawah dapat dilihat target dan anggaran untuk tahun 2022 yang mendukung tercapainya sasaran BPBD sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Program dan Kegiatan**

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	5
<b>1</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>			<b>Rp. 2.292.492.683</b>	<b>Rp. 4.144.712.513</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 15.249.100	Rp. 15.249.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	Rp. 15.249.100	Rp. 15.249.100
1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah			Rp. 1.033.267.683	Rp. 2.078.763.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Rp. 1.033.267.683	Rp. 2.078.763.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp. 75.100.000	Rp. 75.100.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan pengamanan barang milik daerah SKPD	12 bulan	Rp. 75.100.000	Rp. 75.100.000
1.4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah			Rp. 128.126.300	Rp. 128.126.300
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta atribut	12 bulan	Rp. 28.126.300	Rp. 28.126.300

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
		kelengkapannya			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	12 bulan	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
1.5	Administrasi umum perangkat daerah			Rp. 467.361.600	Rp. 467.361.600
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	Rp. 99.490.100	Rp. 99.490.100
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah pelaksanaan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Rp. 32.800.000	Rp. 32.800.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	Rp. 4.551.500	Rp. 4.551.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	Rp. 330.520.000	Rp. 330.520.000
1.7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Rp. 304.177.600	Rp. 323.468.800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp. 84.474.400	Rp. 84.474.400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Rp. 219.703.200	Rp. 238.994.400
1.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			Rp. 269.210.400	Rp. 1.056.643.713
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	Rp. 9.400.000	Rp. 9.400.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	12 bulan	Rp. 188.750.000	Rp. 188.750.000

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
		Lapangan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	Rp. 29.640.400	Rp. 29.640.400
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	Rp. 41.420.000	Rp. 828.853.313
<b>2</b>	<b>Program penanggulangan bencana</b>			<b>Rp. 13.687.934.059</b>	<b>Rp. 17.943.638.735</b>
2.1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Rp. 13.410.875.059	Rp. 17.553.937.135
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	3 kegiatan	Rp. 63.725.000	Rp. 116.996.000
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pascabencana	8 paket	Rp. 12.999.908.459	Rp. 17.089.699.535
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC)	12 bulan	Rp. 347.241.600	Rp. 347.241.600
2.2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Rp. 277.059.000	Rp. 389.701.600
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 bulan	206.996.000	242.921.600
	Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 bulan	70.063.000	146.780.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Indikator kinerja yang baik, setidaknya-tidaknya memenuhi tujuh kriteria yang terdiri dari :

1. Langsung

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

2. Obyektif

Indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional.

Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat.

3. Cukup

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya seharusnya secara cukup mengukur hasil.

4. Kuantitatif (jika mungkin)

Indikator kuantitatif adalah indikator dalam angka.

5. Terinci (jika mungkin)

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer.

6. Praktis

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar.

7. Dapat diyakini

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh.

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik.

1. Indikator kinerja kualitatif

Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan, misalnya, tentang kepuasan pengguna jasa

2. Indikator kinerja kuantitatif

a. Indikator kinerja kuantitatif absolut

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan angka absolut.

b. Indikator kinerja kuantitatif persentase

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan persentase suatu porsi tertentu.

c. Indikator kinerja kuantitatif rasio

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan rasio perbandingan antara dengan yang lain.

d. Indikator kinerja kuantitatif indeks

Indikator kinerja utama dinyatakan dengan menunjukkan indeks.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi adalah merupakan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 di ukur berdasarkan indikator kinerja yang sudah dituangkan dan ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Melalui indikator tersebut beberapa kegiatan dan sub kegiatan akan diketahui apakah mendukung sasaran kinerja yang sedang diukur. Capaian kinerja tersebut merupakan capaian Kepala OPD dimana capaian kepala OPD ini juga merupakan capaian OPD. Apabila capaian kinerjanya baik maka capaian kinerja Kepala OPD yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja juga pasti baik, demikian juga capaian secara organisasi atau OPD juga akan baik, capaian ini tidak terlepas dari capaian masing – masing bidang yang tercakup pada struktur organisasi. Masing-masing bidang terdiri dari beberapa ASN yang tercakup pada OPD tersebut dimana ASN juga akan mendukung tercapainya capaian kinerja OPD. Realisasi capaian / realisasi kinerja tahun 2022 masing-masing bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi.

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama**

NO.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana							
1	Meningkatnya Kesadaran, Kesiapan Dan Kemampuan	Jumlah masyarakat terampil dalam penanggulangan	270 Orang	220 Orang	81%	Tinggi	BPBD
2	Meningkatnya Responsibilitas Penanganan	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu	85%	81%	96%	Tinggi	BPBD
3	Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca	85%	87%	102%	Sangat Tinggi	BPBD

Adapun penjelasan dari capaian realisasi sasaran dan indikator kinerja Tahun 2022 yang ada pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Formulasi untuk sasaran *meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana* yaitu Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana

2. Formulasi untuk sasaran *Meningkatnya Responsibilitas PenangananTanggap Darurat* yaitu Waktu Tanggap Bencana / Waktu Kejadian Bencana x 100 %

3. Formulasi untuk Meningkatkan Pemulihan Lingkungan Pasca Bencana yaitu Jumlah Laporan Lingkungan yang Dipulihkan / Jumlah Laporan Lingkungan yang diidentifikasi x 100 %,

dapat dijelaskan pada tabel dibawah:

**Tabel 3.2 Formulasi Indikator Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	REALISASI TAHUN 2022
Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat terampil dalam penanggulangan bencana	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	220 Orang
Meningkatnya Responsibilitas PenangananTanggap Darurat	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Sesuai Waktu Tanggap (Response Time)	Waktu Tanggap Bencana / Waktu Kejadian Bencana x 100 %	9/11 x 100 % = 81,82 %
Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Pasca Bencana	Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca bencana	Jumlah Laporan Lingkungan yang Dipulihkan / Jumlah Laporan Lingkungan yang diidentifikasi x 100 %	7/8 x 100 % = 87,5 %

Penjelasan dari Indikator Kerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Sesuai dengan Perjanjian kinerja Tahun 2021 uraian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

**Sasaran Strategis** *Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana* dengan **Indikator Kinerja**:

*Jumlah masyarakat terampil dalam penanggulangan bencana.*

Indikator ini untuk mengukur masyarakat yang terampil dalam penanggulangan bencana daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memfasilitasi kelurahan Bandar Utama dan Kelurahan Bandar Sakti menuju Kelurahan Tangguh Bencana, pembentukan kelurahan Tangguh Bencana tahun 2022 yaitu kelurahan Tualang, kelurahan Sri Padang, kelurahan Persiakan, kelurahan Tambangan Hulu, Pembentukan kelurahan Tangguh bencana difasilitasi oleh Fasda (fasilitator daerah) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pelatihan/sosialisasi sekolah rasa aman bencana di daerah rawan bencana kelurahan persiakan, kegiatan edukasi manajemen bencana kepada masyarakat dan tim relawan siaga bencana di kelurahan Pasar Baru, sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana banjir di kelurahan Sri Padang, kegiatan sekolah siaga bencana didaerah rawan bencana di

kelurahan Mandailing, kegiatan ngopi kencana (ngobrol pagi kendalikan bencana), pelatihan BMKG 10 peserta, kegiatan aktivasi program kerja forum pengurangan risiko bencana kelurahan Tangguh bencana di kelurahan Tambangan Hulu dan Kelurahan Persiakan jumlah peserta 120 peserta, dan kegiatan simulasi tanggap darurat bencana banjir jumlah peserta 100 peserta, pembagian bosur-brosur tentang informasi bencana, peta rawan bencana, dan adanya media sosial seperti email, website BPBD, istagram BPBD, Facebook BPBD dan beberapa grup wa baik antar BPBD dengan masyarakat, opd lain, TNI/Polres, atau dinas vertical seperti BMKG, BPS. Kegiatan ini memberikan peringatan dini dan mitigasi tentang akan terjadinya bencana didaerah Kota Tebing Tinggi. Kegiatan tersebut diatas bertujuan untuk menghasilkan masyarakat yang tanggap terhadap bencana, tanggap dalam arti masyarakat tidak panik ketika bencana datang, dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan bencana, bahkan mampu menjadi mitra BPBD dan kelurahan tangguh bencana.

**Gambar 3.1 Dokumentasi Indikator 1**





Tanbangan Kube  
13 Des '22



Tanbangan Kube  
13 Des '22



KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKANGAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA



Tanbangan Kube  
13 Des '22



Tanbangan Kube  
13 Des '22



KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKANGAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA



Timbangan Kube  
13 Des '22



Timbangan Kube  
13 Des '22



KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKANGAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA

KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKANGAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA



Timbangan Kube  
13 Des '22



Timbangan Kube  
13 Des '22



KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKANGAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA

KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKANGAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA



Persiapan  
14 Des '22



Persiapan  
14 Des '22



KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKANGAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA

KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKANGAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA



Persiapkan  
14 Des '22



KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKURAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA



Persiapkan  
14 Des '22



KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKURAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA



Persiapkan  
14 Des '22



KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKURAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA



Persiapkan  
14 Des '22



KEGIATAN AKTIVASI PROGRAM KERJA FORUM PENGUKURAN RISIKO BENCANA KELUHAN TANGGAP BENCANA











**Sasaran Strategis** *Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Tanggap Darurat* dengan **Indikator Kinerja**:

*Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Sesuai Waktu Tanggap (Response Time).*

Indikator ini untuk menunjukkan respon cepat terhadap penanganan bencana. Dari 11 kejadian selama Tahun 2022, 9 kejadian dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan tabel berikut ini :

**Tabel 3.4 Penjelasan Indikator 3**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KEJADIAN</b>	<b>RESPON TIME</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	10-11 Februari	Banjir	0 menit	Saat kejadian personil satgas turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pemantauan debit air di beberapa bentangan/titik sungai, melakukan posko banjir sesuai spt, mengevakuasi warga yang terdampak bencana, mendirikan dapur umum dan memberikan bantuan logistic ke daerah yang terdampak bencana.
2	17 Februari	Banjir	0 menit	Saat kejadian personil satgas turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pemantauan debit air di beberapa bentangan/titik sungai, melakukan posko banjir sesuai spt, mengevakuasi warga yang terdampak bencana, mendirikan dapur umum dan memberikan bantuan

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KEJADIAN</b>	<b>RESPON TIME</b>	<b>KETERANGAN</b>
				logistic ke daerah yang terdampak bencana.
3	18 Agustus	Banjir	0 menit	Saat kejadian personil satgas turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pemantauan debit air di beberapa bentangan/titik sungai, melakukan posko banjir sesuai spt, mengevakuasi warga yang terdampak bencana, mendirikan dapur umum dan memberikan bantuan logistic ke daerah yang terdampak bencana.
4	09 Desember	Banjir	0 menit	Saat kejadian personil satgas turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pemantauan debit air di beberapa bentangan/titik sungai, melakukan posko banjir sesuai spt, mengevakuasi warga yang terdampak bencana, mendirikan dapur umum dan memberikan bantuan logistic ke daerah yang terdampak bencana.logistik.
5	11 Desember	Banjir	0 menit	Saat kejadian personil satgas turun ke lapangan

NO	TANGGAL	KEJADIAN	RESPON TIME	KETERANGAN
				<p>untuk melakukan pengecekan dan pemantauan debit air di beberapa bentangan/titik sungai, melakukan posko banjir sesuai spt, mengevakuasi warga yang terdampak bencana, mendirikan dapur umum dan memberikan bantuan logistic ke daerah yang terdampak bencana.</p>
6	15 Desember	Banjir	0 menit	<p>Saat kejadian personil satgas turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pemantauan debit air di beberapa bentangan/titik sungai, melakukan posko banjir sesuai spt, mengevakuasi warga yang terdampak bencana, mendirikan dapur umum dan memberikan bantuan logistic ke daerah yang terdampak bencana.</p>
7	19 Desember	Banjir	0 menit	<p>Saat kejadian personil satgas turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pemantauan debit air di beberapa bentangan/titik sungai, melakukan posko banjir sesuai spt,</p>

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KEJADIAN</b>	<b>RESPON TIME</b>	<b>KETERANGAN</b>
				mengevakuasi warga yang terdampak bencana, mendirikan dapur umum dan memberikan bantuan logistic ke daerah yang terdampak bencana.
8	20 Desember	Banjir	0 menit	Saat kejadian personil satgas turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pemantauan debit air di beberapa bentangan/titik sungai, melakukan posko banjir sesuai spt, mengevakuasi warga yang terdampak bencana, mendirikan dapur umum dan memberikan bantuan logistic ke daerah yang terdampak bencana.
9	28 Januari	Kebakaran	1 menit	laporan
10	13 Maret	Kebakaran	1 menit	tidak proses karna berkas kurang lengkap
11	01 April	Kebakaran	1 menit	tidak proses karna berkas kurang lengkap
12	25 April	Kebakaran	1 menit	laporan
13	16 Mei	Kebakaran	1 menit	laporan
14	22 Juli	Kebakaran	1 menit	laporan
15	26 Agustus	Kebakaran	1 menit	laporan
16	29 Nopember	Kebakaran	1 menit	laporan
17	29 Nopember	Kebakaran	1 menit	laporan

NO	TANGGAL	KEJADIAN	RESPON TIME	KETERANGAN
18	23 Nopember	Putting Belung	1 menit	laporan
19	25 September	Longsor	1 menit	laporan

Gambar. 3.2 Dokumentasi Indikator 2

















**Sasaran Strategis** *Meningkatnya Pemulihan Lingkungan pascabencana de***Indikator Kinerja:**

*Persentase Lingkungan yang Dipulihkan Pasca Bencana*

Indikator ini untuk mengukur pemulihan lingkungan pasca bencana melalui upaya perbaikan penahan sungai, membangun tembok penahan sungai dan membangun bronjong disekitar bantaran sungai untuk menahan luapan air kiriman dari kabupaten Simalungun ataupun Serdang Badagei. Adapun perbaikan dan pembangunan yang sudah terlaksana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5 Penjelasan indikator 2**

<b>NO</b>	<b>KEJADIAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>PEMULIHAN</b>
1	Banjir	Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota	Lanjutan Rekonstruksi tembok penahan sungai Sei. Bahilang
2	Banjir	Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu	Lanjutan Rekonstruksi tembok penahan sungai Sei. Bahilang
3	Banjir	Kelurahan Sri Padang	Pembangunan Bronjong Sei. Padang – Batal Lelang
4	Banjir	Kelurahan Pinang Mancung / Kelurahan Berohol	Pembangunan Turap/Bronjong Sei. Sibarau
5	Banjir	Kelurahan Persiakan	Pembangunan Dinding Penahan sungai Sei. Bahilang

<b>NO</b>	<b>KEJADIAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>PEMULIHAN</b>
6	Banjir	Kelurahan Badak Bejuang	Pembangunan lanjutan penambahan tinggi dinding penahan sungai Sei Padang
7	Banjir	Jl. Datuk Bandar kajum Kelurahan Tebing Tinggi Lama	Perbaikan bronjong dan penggantian pintu air
8	Banjir	Jl. Bawang Merah Kelurahan Bandar Sakti	Rehab dinding penahan dan pergantian pintu air

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 8 Kejadian bencana dan 7 kejadian yang sudah ditangani. Melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat menikmati adanya pembangunan penahan sungai, bronjong dan tembok sungai, dimana yang sebelumnya masyarakat yang tinggal disekitar sungai tersebut ketika bencana banjir air masuk kedalam rumah kini banjir tersebut sudah tidak masuk lagi kedalam rumah, ketika musim hujan air akan meluap menggenangi seluruh dataran rendah disekitaran rumah warga sehingga masyarakat melintas terganggu kini sudah dapat melintas tanpa ada gangguan banjir, perabotan rumah semakin awet, aktivitas sehari-hari dapat berjalan tanpa gangguan banjir. Anak sekolah dapat sekolah tanpa gangguan banjir, dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian masih perlu lagi pembenahan terhadap infrastruktur yang rusak akibat bencana terkhusus banjir di daerah Tebing Tinggi, karna pembenahan atau rekonstruksi akibat bencana harus terus dilakukan secara berkesinambungan dan tetap memberkan edukasi kepada masyarakat daerah Kota Tebing Tinggi untuk dapat menjaga lingkungan dengan baik.







**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja**

NO.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5		6	7	8
Tujuan : Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana								
1	Meningkatnya Kesadaran, Kesiapan Dan Kemampuan	Jumlah masyarakat terampil dalam penanggulangan	270 Orang	216 Orang	80 %	270 Orang	220 Orang	81%
2	Meningkatnya Responsibilitas Penanganan	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu	85%	100%	117%	85%	81%	96%
3	Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca	85%	85%	85%	85%	87%	102%

**Tabel 3.6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan RPJMD**

NO.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR RPJMD 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
Tujuan : Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana					
1	Meningkatnya Kesadaran, Kesiapan Dan Kemampuan Masyarakat	Jumlah masyarakat terampil dalam penanggulangan	220 Orang	300 Orang	73%
2	Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Tanggap	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	81%	90%	90%
3	Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca bencana	87%	90%	96%

**Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi**

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana							
1	Meningkatnya Kesadaran, Kesiapan Dan Kemampuan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat terampil dalam penanggulangan bencana	270 Orang	220 Orang	81%	Untuk sekali pelatihan yang dilakukan membutuhkan waktu 2-3 hari, sehingga kemungkinan ada tingkat kejenuhan peserta pelatihan	Membuat variasi pelatihan supaya semakin menarik, sehingga peserta rapat fokus dan hadir terus selama pelatihan
2	Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Tanggap Darurat	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap (response time)	85%	81%	96%	Sdh baik	
3	Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca bencana	85%	87%	102%	Sdh baik	

**Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana						
1	Meningkatnya Kesadaran, Kesiapan Dan Kemampuan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat terampil dalam penanggulangan bencana	270 Orang	220 Orang	81%	Untuk sekali pelatihan yang dilakukan membutuhkan waktu 2-3 hari, sehingga kemungkinan ada tingkat kejenuhan peserta pelatihan	Membuat variasi pelatihan supaya semakin menarik, sehingga peserta rapat fokus dan hadir terus selama pelatihan
2	Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Tanggap Darurat	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap (response time)	85%	81%	96%	Sdh baik	
3	Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca bencana	85%	87%	102%	Sdh baik	

### 3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar Rp. 20.934.481.102,- atau sebesar 94,78%. dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 22.088.351.248,-. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	5		
1	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>		<b>Rp. 4.144.712.513</b>		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp. 15.249.100	Rp. 15.249.100	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 15.249.100	Rp. 15.249.100	100 %
1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah		Rp. 2.078.763.000	Rp. 2.044.241.979	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 2.078.763.000	Rp. 2.044.241.979	98,34%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp. 75.100.000	Rp. 29.277.058	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan pengamanan barang milik daerah SKPD	Rp. 75.100.000	Rp. 29.277.058	38,98%
1.4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Rp. 128.126.300	Rp. 128.049.607	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp. 28.126.300	Rp. 28.065.200	99,78%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp. 100.000.000	Rp. 99.984.407	99,98%
1.5	Administrasi umum perangkat daerah		Rp. 467.361.600	Rp. 454.044.613	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 99.490.100	Rp. 86.231.300	86,67%
	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 32.800.000	Rp. 32.799.800	100%

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	5		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4.551.500	Rp. 4.550.000	99,97%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 330.520.000	Rp. 330.463.513	99,98%
1.7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp. 323.468.800	Rp. 303.566.042	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 84.474.400	Rp. 74.679.142	88,40
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 238.994.400	Rp. 228.886.900	95,77%
1.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp. 1.056.643.713	Rp. 1.035.592.558	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 9.400.000	Rp. 2.868.140	30,51%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 188.750.000	Rp. 188.465.825	99,85%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 29.640.400	Rp. 28.215.000	95,19%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 828.853.313	Rp. 816.043.593	98,45%
<b>2</b>	<b>Program penanggulangan bencana</b>		<b>Rp. 17.943.638.735</b>	<b>Rp. 17.943.638.735</b>	
2.1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Rp. 17.553.937.135	Rp. 16.664.094.545	

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	5		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 116.996.000	Rp. 103.464.000	88,43%
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah paket penanganan pascabencana	Rp. 17.089.699.535	Rp. 16.216.063.398	94,89%
	Pengembangan Kapsitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC)	Rp. 347.241.600	Rp. 344.567.147	99,23%
2.2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Rp. 389.701.600	Rp. 260.365.600	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	242.921.600	148.273.600	61,04%
	Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	146.780.000	112.092.000	76,37%

### 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat disajikan seperti dibawah ini:

**Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
1	2		4	5	6	7	8	9
Tujuan : Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana								
1	Meningkatnya Kesadaran, Kesiapan Dan Kemampuan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	270 Orang	220 Orang	81%	4.261.708.513	4.113.484.957	96%	15,04
2	Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Tanggap Darurat	85%	100%	118%	736.943.200	260.365.600	35%	60,66
3	Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	85%	84%	99%	17.089.699.535	16.216.063.398	94%	7,11

**Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian				
1	2				5			
1	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>							
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 15.249.100	Rp. 15.249.100	100 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 15.249.100	Rp. 15.249.100	100 %	0
1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah				Rp. 2.078.763.000	Rp. 2.044.241.979		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 2.078.763.000	Rp. 2.044.241.979	98,34%	1,66
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 75.100.000	Rp. 29.277.058		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 75.100.000	Rp. 29.277.058	38,98%	61,02
1.4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah				Rp. 128.126.300	Rp. 128.049.607		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Rp. 28.126.300	Rp. 28.065.200	99,78%	0,22
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Rp. 100.000.000	Rp. 99.984.407	99,98%	0,02
1.5	Administrasi umum perangkat daerah				Rp. 467.361.600	Rp. 454.044.613		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 99.490.100	Rp. 86.231.300	86,67%	13,33
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 32.800.000	Rp. 32.799.800	100%	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 4.551.500	Rp. 4.550.000	99,97%	0,03
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 330.520.000	Rp. 330.463.513	99,98%	0,02



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian				
1	2				5			
1.7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				Rp. 323.468.800	Rp. 303.566.042		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 84.474.400	Rp. 74.679.142	88,40	11,60
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 238.994.400	Rp. 228.886.900	95,77%	4,23
1.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				Rp. 1.056.643.713	Rp. 1.035.592.558		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 9.400.000	Rp. 2.868.140	30,51%	69,49
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 188.750.000	Rp. 188.465.825	99,85%	0,15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 29.640.400	Rp. 28.215.000	95,19%	4,81
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 828.853.313	Rp. 816.043.593	98,45%	1,55
<b>2</b>	<b>Program penanggulangan bencana</b>							
2.1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				Rp. 17.553.937.135	Rp. 16.664.094.545		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan		Rp. 116.996.000	Rp. 103.464.000	88,43%	11,57
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	7 Paket	7 Paket	100%	Rp. 17.089.699.535	Rp. 16.216.063.398	94,89%	5,11
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	100 %	Rp. 347.241.600	Rp. 344.567.147	99,23%	0,77
2.2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				Rp. 389.701.600	Rp. 260.365.600		

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian				
1	2				5			
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	100 %	242.921.600	148.273.600	61,04%	38,96
	Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	100 %	146.780.000	112.092.000	76,37%	23,63

## BAB IV

### PENUTUP

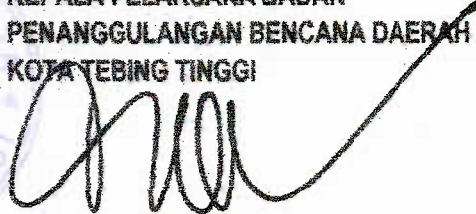
#### 4.1 Kesimpulan

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya laporan kinerja instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sekalipun dari kegiatan dan sub kegiatan anggaran belum semua terserap 100 persen, dikarenakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana bersifat situasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017-2022. Dimasa mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi akan tetap bertekad untuk meningkatkan hasil capaian kinerja ini dengan terus berbenah diri melalui pemantapan sumber daya aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan.



Tebing Tinggi, 27 Februari 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI

  
TORA DAENG MASARO, ST, M.SI  
PEMBINA

NIP. 19731101 200502 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR : 800/ III /BPBD-TT/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan;
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik

Nomor 5679);

6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah, serta peraturan lain yang ditentukan;
2. Dalam rangka terciptanya validitas, kualitas, dan akuntabilitas Laporan Kinerja yang disusun. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

bertanggungjawab terhadap data dimaksud.

b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja atau Instansi lain.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 05 Januari 2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI  
KEPALA PELAKSANA,**

  
TORA DAENG MASARO, ST, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19731101 200502 1 001

Tembusan:

1. Walikota Tebing Tinggi.
2. Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
3. Ka.Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
4. Ka. Bagian Keuangan Setdako Tebing Tinggi.
5. Kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi

Nomor : 008 / 112 / BPBD – TT / 2023

Tanggal : Januari 2023

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

1. PENANGGUNG-JAWAB : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING TINGGI
2. KOORDINATOR : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING TINGGI
3. KELOMPOK KERJA :
- A. BIDANG SEKRETARIAT
1. KETUA : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING TINGGI
2. ANGGOTA : 1. PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA  
2. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
3. PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT/ DAERAH  
4. PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA  
5. BENDAHARA
- B. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
1. KETUA : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
2. ANGGOTA : 1. PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN  
2. PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS MITIGASI BENCANA  
3. PENYULUH BENCANA  
5. PEMERIHARA SARANA DAN PRASARANA
- C. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1. KETUA : KEPALA KEDARURATAN DAN LOGISTIK
2. ANGGOTA : 1. PEJABAT FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA  
2. PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA  
3. PEJABAT FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA  
4. PEMELIHARA PERALATAN
- D. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
1. KETUA : KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
2. ANGGOTA : 1. PEJABAT FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA  
2. PETUGAS PENGAMBIL CONTOH

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI  
KEPALA PELAKSANA,**



*(Signature)*  
TORA DAENG MASARO, ST, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19731101 200502 1 001

# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
Kota Tebing Tinggi

**Unit Kerja**  
**Sekretariat**

nomor SOP	001/12/187BU-11/2023
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Januari 2023
Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nama SOP	SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

## Dasar Hukum

1. Undang-Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NO.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO.4421
2. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 060/16217 Perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK)

## Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan
2. Pejabat administrasi dan pejabat teknis
3. Memahami teknis kearsipan

## Keterkaitan

LAKIP/LKT disusun berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) yang berisi program dan kegiatan serta mengacu pada RKPD.  
SOP Penyusunan LKjIP berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Penetapan Kinerja

## Peralatan/perengkapan

1. RPJMD
2. Rencana Strategis (Renstra)
3. RKA
4. Rencana Kerja Pembangunan
5. DPA
6. komputer
7. Kalkulator

## Peningkatan

Penyusunan LKjIP dalam rangka evaluasi penetapan kinerja dan pencapaian kinerja.


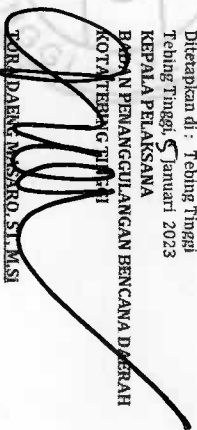
## Pencatatan dan pendataan

Dokumen LKjIP yang sudah tersusun segera didistribusikan kepada Inspektorat

Jika LKjIP tidak tersusun maka kewajiban penyelenggaraan pertanggungjawaban pemerintah akan tidak bisa memberikan informasi capaian kinerja yang ditetapkan oleh BPBD



No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		staf	sekreteris/ kasi	ka lak. Badan				
1	Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan LKJIP				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	tersedianya bahan penyusunan LKJIP	
2	Mengkomunikasikan Penetapan Kinerja				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	terjadinya koordinasi antar bidang	
3	Menetapkan Rencana Kerja				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	ditertapkannya rencana kerja	
4	Mengadakan Pengukuran Kinerja Kegiatan				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	terukurinya kinerja kegiatan	
5	Mengadakan pengukuran capaian sasaran				Renstra, RKA, DPA, PK, PKK, PPS	1 hari	terukurinya capaian sasaran	
6	Menyiapkan draft LKJIP				Dokumen Draft LAKJIP	1 hari	tersedianya draft dokumen LKJIP	
7	Mengadakan pembahasan draft LKJIP				Dokumen Draft LAKJIP	1 hari	terkoordinasinya penyusunan LKJIP	
8	Mengadakan evaluasi LKJIP				Dokumen LAKJIP	1 hari	terevaluasinya dokumen LKJIP	
9	Memohonkan persetujuan Dokumen LKJIP				Dokumen LAKJIP	1 hari	terkoreksinya dan ditandatanganinya dokumen LKJIP	
9	Mendistribusikan LKJIP				Dokumen LAKJIP	1 hari	terdistribusinya LKJIP BPBD	
10	Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen LKJIP				Dokumen LAKJIP	1 hari	tersimpannya dokumen LKJIP BPBD	
11	Menyaksanakan proses penyusunan LKJIP							

  
 Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
 Tebing Tinggi, 5 Januari 2023  
 KEPALA PELAKSANA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA TEBING TINGGI**  
  
 TOR DAERAH MARSARO, S.T.M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19731101 200502 1 001